

**PERKEMBANGAN SISTEM KOMPUTERISASI
DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Disusun Oleh:

M. HADY ARMAN R
NIM. 05142186/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2009

INTISARI

Era komputerisasi telah membuka wawasan dan paradigma baru dalam pengambilan keputusan dan penyajian informasi, sehingga pola pikir dan kebutuhan masyarakat akan segala sesuatu terutama informasi juga semakin meningkat termasuk informasi pertanahan, dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) merupakan instansi pemerintah yang menangani masalah pertanahan. Salah satu wujud usaha BPN-RI dalam meningkatkan pelayanan pertanahan adalah dengan pemanfaatan sistem komputerisasi agar mampu mengurangi dan menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan pertanahan serta mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang cepat, lengkap dan rapi. Kantor Pertanahan Kota Makassar merupakan salah satu kantor pertanahan yang telah menerapkan pemanfaatan sistem komputerisasi pelayanan pada pelayanan pertanahannya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan sistem komputerisasi pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dan juga untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam upaya perkembangan sistem komputerisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni menggambarkan proses perkembangan pelayanan pertanahan secara komputerisasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Adapun pengambilan datanya adalah dengan observasi, wawancara dan studi dokumen sedangkan teknik analisis datanya adalah deskriptif komparatif yaitu terlebih dahulu dengan membuat uraian-uraian dari data yang diperoleh baik data kualitatif maupun data kuantitatif kemudian membandingkannya.

Hasil dari penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kota Makassar telah melakukan perkembangan sistem komputerisasi yang meliputi: Digitalisasi Pelayanan Loker, menggunakan presensi pegawai secara elektronik termasuk pemasangan kamera *Close Circuit Television* (CCTV), Aplikasi *Land Office Computerization* (LOC) Phase IIB, Aplikasi Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), dan Aplikasi Jaringan Untuk Sistem Tatalaksana Informasi Sengketa Pertanahan Se Indonesia (Justisia). Terjadi peningkatan kuantitas yang belum signifikan dari penggunaan Aplikasi LOC Phase IIB. Meskipun persentase penyelesaian yang dihasilkan terjadi peningkatan dari LOC Phase IIA Tahun 2007 sebesar 80,731%, Tahun 2008 sebesar 91,519% dan Phase IIB Tahun 2009 menjadi 97,047% dalam 3 bulan penggunaan. Akan tetapi, jumlah permohonan yang masuk dan terselesaikan lebih banyak pada penggunaan LOC Phase IIA. Pada Phase IIA Tahun 2008, permohonan masuk rata-rata perbulannya sebanyak 1000 permohonan dan terselesaikan rata-rata perbulannya sebanyak 915 permohonan, sedangkan pada LOC Phase IIB lebih sedikit, permohonan masuk rata-rata perbulannya 801 permohonan dan terselesaikan rata-rata perbulannya 778 permohonan. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi belum signifikan. Penerapan sistem komputerisasi tersebut masih menghadapi hambatan yang menyangkut kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sehingga memerlukan sosialisasi, adaptasi dan pelatihan lebih lanjut kepada para pegawai terutama petugas operasional agar terjadi keseimbangan antara kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan volume pekerjaan yang ada.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Intisari	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Pengertian Sistem Informasi	7
2. Sistem Informasi Berbasis Komputer	9
3. Sistem Informasi Pertanahan	11
4. Sistem Komputerisasi Pelayanan Kantor Pertanahan Dengan Menggunakan Aplikasi <i>Land Office Computerization (LOC)</i>	13
5. Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah)	16
B. Kerangka Pemikiran.....	21
C. Anggapan Dasar	24
D. Batasan Operasional	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel	26
D. Jenis dan Sumber Data	26
1. Data Primer	26
2. Data Sekunder	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
1. Observasi	27
2. Wawancara	27
3. Studi Dokumen	28
F. Teknik Analisis Data	28

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Kota Makassar	30
B. Tinjauan Umum kantor Pertanahan Kota Makassar	32
1. Keadaan Pegawai	32
2. Tugas dan Fungsi Tiap Seksi Pada Kantor Pertanahan	34
3. Sarana dan Prasarana	41
 BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Makassar	43
B. Sistem Komputerisasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar	46
1. Sistem Komputerisasi Pelayanan Pertanahan dengan <i>Land Office Computerisation</i> (LOC)	46
2. Sistem Komputerisasi Pelayanan Pertanahan dengan Larasita di Kantor Pertanahan Kota Makassar	61
3. Sistem Komputerisasi Pelayanan Pertanahan dengan Justisia di Kantor Pertanahan Kota Makassar	66
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era komputerisasi telah membuka wawasan dan paradigma baru dalam proses pengambilan keputusan dan penyajian informasi, sehingga perkembangannya merupakan suatu realitas yang tidak mungkin dihindari. Seiring dengan itu, pola pikir dan kebutuhan masyarakat akan segala sesuatu terutama kebutuhan akan informasi juga semakin meningkat. Informasi pertanahan merupakan salah satu informasi penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan salah satu pemegang kebijakan mengenai bidang pertanahan sehingga memiliki peran penting untuk mewujudkan dan memberikannya kepada masyarakat.

BPN RI mempunyai tugas pokok yang bersifat pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan antar kelembagaan atau lintas sektoral, hal tersebut tertuang dalam pasal (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Sasaran dari pelayanan ini adalah kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani yaitu masyarakat. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (KBPN RI) dalam melaksanakan tugasnya menyusun

berbagai rencana strategis dalam pelaksanaan tugas dan kewewenangannya. Rencana Strategis tersebut tertuang dalam 11 (sebelas) agenda kebijakan BPN RI.

Adanya 11 (sebelas) agenda kebijakan tersebut telah memperjelas visi dan misi BPN RI dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya di bidang pertanahan. Poin yang sangat jelas mengenai peningkatan pelayanan dan pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan tertuang pada angka 2 (dua) yaitu Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertipikat tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia) dan angka 6 (enam) yaitu Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, BPN RI telah menetapkan beberapa kebijaksanaan antara lain dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan dan disempurnakan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP). Berkaitan dengan peraturan SPOPP pada Pasal (2) menyebutkan bahwa SPOPP wajib dilaksanakan oleh BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Keputusan ini kemudian dilengkapi dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

Kegiatan pelayanan pertanahan merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan cara koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan secara sederhana, cepat, murah dan tepat waktu serta tetap menjamin kepastian hukum, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat merupakan suatu sistem kegiatan yang harus dilakukan secara benar dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku demi pemberian pelayanan sebaik-baiknya untuk masyarakat.

Salah satu wujud usaha BPN RI dalam meningkatkan pelayanan pertanahan yang berkualitas untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan pelayanan pertanahan yang semakin kompleks adalah dengan menggunakan suatu pemanfaatan sistem komputerisasi. Pemanfaatan sistem komputerisasi tersebut pada dasarnya merupakan upaya peningkatan tahapan prosedur pelayanan pertanahan, agar mampu mengurangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelayanan pertanahan dan dapat mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang cepat, lengkap dan rapi.

Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas pemberian pelayanan bidang pertanahan kepada masyarakat tentunya akan menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia aparat kantor pertanahan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sumber daya manusia merupakan hal yang memiliki peranan sangat penting dalam suatu organisasi atau unit kerja. Secanggih dan sebaik apapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia, demikian juga halnya dengan kantor pertanahan, usaha apapun yang akan dilakukan tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, maka usaha tersebut tidak akan banyak berguna atau bahkan akan menjadi suatu pekerjaan yang sia-sia.

Kantor Pertanahan Kota Makassar merupakan salah satu dari sekian banyak kantor pertanahan yang telah berupaya menerapkan pemanfaatan dan pengembangan sistem komputerisasi pelayanan pada pelayanan pertanahannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya pengembangan dari aplikasi sistem komputerisasi pelayanan tersebut di Kantor Pertanahan Kota Makassar, dengan judul **“Perkembangan Sistem Komputerisasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”**.

B. Rumusan Permasalahan

Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam perkembangannya berusaha melayani masyarakat dalam pelayanan pertanahan, dengan melakukan berbagai usaha diantaranya dengan pelaksanaan sistem komputerisasi pelayanan. Dalam perkembangan komputerisasi pelayanan yang diterapkan, ternyata tidaklah berjalan dengan mudah sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi lapangan, kesiapan aparat kantor itu sendiri hingga masalah sarana dan prasarana yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan sistem komputerisasi pelayanan pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Makassar?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan sistem komputerisasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perkembangan sistem komputerisasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar.

- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam perkembangan sistem komputerisasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan wawasan menyangkut ilmu pengetahuan tentang komputerisasi pelayanan publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan, pemikiran dan pertimbangan dalam upaya peningkatan pelayanan pertanahan secara komputerisasi di masa yang akan datang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem komputerisasi yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar meliputi:
 - a. Presensi Pegawai dan kamera *CCTV*, sejak Tahun 2007.
 - b. Digitalisasi Pelayanan Loker, sejak february 2009.
 - c. Penggunaan Aplikasi Justisia, sejak Tahun 2009.
 - d. Aplikasi LOC Phase IIB, sejak february 2009.
 - e. Larasita, sejak february 2009.
2. Dampak perkembangan sistem komputerisasi yakni adanya peningkatan kuantitas pelayanan yang belum signifikan setelah Aplikasi LOC Phase IIB:
 - a. Rata-rata persentase penyelesaian pekerjaan perbulannya meningkat, untuk Tahun 2007 sebesar 80,731%, Tahun 2008 sebesar 91,519% (LOC Phase IIA), sedangkan LOC Phase IIB meningkat menjadi 97,05% (tiga bulan penggunaan).
 - b. Rata-rata jumlah permohonan masuk dan terselesaikan perbulannya, lebih banyak pada penggunaan LOC Phase IIA Tahun 2008 (permohonan masuk 1000, terselesaikan 915), sedangkan pada Penggunaan LOC Phase IIB Tahun 2009 (permohonan masuk 801, terselesaikan 778), karena hal tersebut maka peningkatan yang terjadi belum signifikan.

B. Saran.

1. Perkembangan sistem komputerisasi yang telah ada perlu dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi, antara lain pelayanan informasi pertanahan melalui telepon atau *short message service* (sms) seperti yang telah diterapkandi beberapa kantor pertanahan.
2. Perlu sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut tentang aplikasi sistem komputerisasi kepada para pegawai terutama petugas operasional agar kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bisa seimbang dengan volume pekerjaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Tubagus Haedar, (2001), *Strategi Teknologi Informasi Di Bidang Pertanahan*, Bulletin Sandi Sasana Widyabhumi, Edisi XVI/Juli/2001, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Anonim, (2003), *Panduan Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- _____, (2003), *Sambutan KBPN, Pembukaan Rapat Kerja Teknis Bidang Informasi Pertanahan dan Evaluasi LOC Phase IIA serta Sosialisasi LOC Phase IIB*, Himpunan Pidato 2003 Kepala Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Anwar, Khoirul dan Asianti Oetojo, (2004), *Apliasi Sistem manajemen Bagi Pemerintah Di Era Otonomi Daerah (SIMDA)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta*, Jakarta.
- Basuki, Gatot Eko, (1998), *Sistem Informasi Manajemen Di Bidang Pertanahan Nasional*, Jurnal Pertanahan, No. 13 – 1998, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Gunanegara, (2005), *Memberikan Pelayanan Masyarakat Seiring Kemajuan Teknologi Informasi*, bhumi Mewujudkan Reforma Agraria, Edisi 02 Tahun 2007, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Subando Agus Margono, (1994), *Sistem informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muryono, Slamet, (2005), *Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional*, Bulletin Sandi Sasana Widyabhumi, Edisi XXII Oktober 2005, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

- _____, (2007), *Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi Dan Alternatif Pengembangannya Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional*, Bhumi Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, No. 16 Tahun 7 April 2007, Yogyakarta.
- Nazir, Moh, (2005), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Prahasta, Eddy, (2002), *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar*, Informatika, Bandung.
- Proborini, Atityo Dyah, (2008), *Penerapan Stand Alone System (SAS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Sukandarrumidi, (2004), *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sutaryono dan Suharno, (2002), *Pelaksanaan Land Office Computerization (LOC) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri*, Bhumi Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, No. 3 Tahun 2 Desember 2002, Yogyakarta.
- Syahrul, (2008), *Pemanfaatan Peranti Lunak ArcView Gis 3.3 Dalam Membangun Basisdata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanan (P4T) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten*, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Trimo, Soejono, (1987), *Dari Dokumentasi Ke Sistem Informasi Manajemen*, Remadja Karya, Bandung.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan (SPOPP)

Keputusan KBPN RI No. 80 tahun 2008 Tentang Pembentukan jaringan Untuk Sistem Tatalaksana Informasi Sengketa Pertanahan Se Indonesia

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan.